

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Investor, Kreditur dan Donatur, Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Proses pengidentifikasian pada akuntansi keuangan daerah maksudnya adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak bersifat ekonomi. Pada dasarnya, transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi seluruh transaksi dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan/atau pengurangan sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. Laporan keuangan dalam pemerintah daerah meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*), artinya setiap transaksi ekonomi dicatat berpasangan dan disebut juga dengan proses menjurnal. Dalam menjurnal, pencatat harus menjaga persamaan dasar akuntansi, dimana kedua sisi persamaan tersebut harus selalu seimbang, demikian juga hasil akhir atau saldonya juga harus seimbang.

Unsur yang menyusun persamaan dasar akuntansi adalah elemen-elemen laporan keuangan. Elemen-elemen tersebut terdiri atas aktiva, utang, ekuitas dana atau rekening koran pemerintah daerah, pendapatan dan belanja. Aktiva/aset adalah sarana (kekayaan) yang dimiliki entitas.

Utang adalah sumber sarana entitas yang berasal dari bukan pemilik entitas. Ekuitas dana atau R/K pemerintah daerah adalah sumber sarana entitas yang berasal dari pemilik entitas. Pendapatan adalah bertambahnya aktiva atau penurunan utang karena aktivitas entitas. Belanja adalah berkurangnya aktiva karena aktivitas entitas. Persamaan dasar akuntansi menyatakan bahwa aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana atau R/K pemerintah daerah dan pendapatan.

Akuntansi adalah suatu sistem yang tujuannya adalah menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah terdiri atas laporan perhitungan APBD nota perhitungan APBD, laporan aliran kas dan neraca. Akuntansi, disamping merupakan sistem juga merupakan siklus, artinya akuntansi terdiri atas tahap-tahap tertentu dan setelah selesainya tahap-tahap tersebut kegiatan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Tahap-tahap yang terdapat dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi, jurnal, posting, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, penutupan, dan neraca saldo setelah penutupan.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur.

Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan daerah, tidak terkecuali Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaranyang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawarandiwajibkan melakukan akuntansi keuangan daerah yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan SAP bukanlah hal yang dapat dengan mudah diwujudkan. Di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan pada tiga tahun terakhir (2010,2017 dan 2013), terdapat kelemahan di dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan trasaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang handal dan berkualitas tinggi.

## **1.2 Ruang Lingkup kerja Program KP**

Agar Pembahasan kerja praktek dapat secara maksimal dan dibahas sesuai dengan objek dan permasalahan yang ada maka dibuat beberapa ruang lingkup/batasan kerja praktek, adapun ruang lingkup/batasan kerja praktek yang akan dibahas dalam laporan kerja praktek ini adalah :

1. Lokasi kerja Praktek yang dilaksanakan di DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESAWARAN.
2. Waktu Kerja Praktek yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus hingga 20 September 2019.
3. Penelitian ini hanya akan membahas apakah pelaporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **1.3 MANFAAT DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Manfaat**

Penelitian ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak pihak sebagai berikut :

##### **1.3.1.1 Bagi Penulis**

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu :

Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.

##### **1.3.1.2 Bagi Universitas/Institusi**

Terjalinnya kerjasama atau hubungan baik antara IIB DARMAJAYA dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran. IIB DARMAJAYA dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang dan IIB DARMAJAYA juga akan dikenal di dunia industri kerja.

##### **1.3.1.3 Bagi Tempat Magang**

Dapat memberikan Wacana dan masukan yang dapat dipertimbangkan khususnya dalam pelaporan keuangan agar lebih baik pelaksanaannya.

### **1.3.2 Tujuan**

#### **1.3.2.1 Tujuan diadakannya kegiatan Kerja Praktek (KP) adalah :**

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di IIB DARMAJAYA.
2. Untuk mempraktekkan teori yang didapat dalam perkuliahan kelapangan (Instansi Pemerintahan) yang sesuai dengan jurusan yaitu Akuntansi Keuangan di IIB DARMAJAYA.
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.
4. Menyaksikan langsung penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam praktek di lapangan.

### **1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

#### **1.4.1 Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan Kerja Praktek (KP) dimulai dari tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019. Hari kerja yaitu dari hari Senin-Kamis pada pukul 07.30-15.30 WIB, dan hari Jumat pukul 07.30-16.00 WIB.

#### **1.4.2 Tempat Pelaksanaan**

Tempat pelaksanaan Kerja Praktek (KP) :

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran Jalan Pramuka Sukaraja I Gedung Tataan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini, maka digunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca menelusuri dan memahami isi Laporan Kerja Praktek antara lain sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, ruang lingkup/batasan kerja praktek yang membatasi permasalahan, tujuan dan manfaat, tempat dan waktu pelaksanaan dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

## **BAB II TEMPAT KERJA PRAKTEK**

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan /organisasi, bidang usaha /kegiatan utama organisasi, lokasi organisasi tempat kerja praktek, struktur organisasi dan uraian tanggung jawab setiap bagian /unit organisasi tersebut.

## **BAB III PERMASLAHAAN ORGANISASI**

Pada bab ini penulis menguraikan permasalahan organisasi, metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil analisis mengenai Anggaran kas sebagai alata perencanaan dan pengendalian dan landasan teori.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN**

Bagian ini memuat uraian hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan landasan teori yang relevan dan pembahasan hasil analisis Anggaran Kas sebagai Alat perencanaan dan pengendalian pada LKS APIK MANDIRI.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini memuat kesimpulan yang menjelaskan masalah dan solusi yang diperoleh serta berisi saran – saran yang perlu diperhatikan berdasarkan hal – hal yang ditemukan sebagai saran pengembangan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat di implementasikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

